

PEREMPUAN DALAM DIASPORA KOREA SELATAN DI INDONESIA 1973-1998: STRUKTUR GENDER, AGENSI KOLEKTIF, DAN REPRODUKSI BUDAYA

Amira Rifni Yasmin

Magister Sejarah, Universitas Gadjah Mada

Email Korespondensi: am2dala@gmail.com

Diterima: 20 Juli 2026

Direvisi: 2 Agustus 2026

Disetujui: 10 Agustus 2026

ABSTRACT

The early South Korean diaspora in Indonesia emerged through a corporate-state migration pathway that began in the early 1970s, marked by the entry of South Korean construction and manufacturing companies into Indonesia within the framework of New Order bilateral investment policy. Existing literature has generally analyzed this community from the perspective of economic integration and community institution-building, while the gendered dimension of diaspora formation has received little attention. This article examines the role of Korean women, who came to Indonesia primarily as corporate expatriate accompanying spouses, in building and sustaining the sociocultural infrastructure of the Korean diaspora community in Indonesia between 1973 and 1998. Using a qualitative historical method combining institutional records with personal audiovisual narratives, the findings show that the corporate-state pathway carried a structural gender bias, in which men were filtered through as labor migrants while women entered as dependents. From this subordinate structural position, however, Korean women developed an active agency operating across three levels, cultural reproduction, transnational solidarity, and local integration. In doing so, women became the primary architects of the sociocultural infrastructure that enabled the Korean diaspora community to maintain its cultural autonomy. This article argues that the entry pathway of a diaspora determines not only its economic character, but also the gendered structure that shapes its continuity.

Keywords: Korean diaspora, expatriate women, community infrastructure, cultural reproduction, Indonesia.

PENDAHULUAN

Diaspora Korea Selatan di Indonesia tidak terbentuk melalui keputusan migrasi individual, melainkan melalui jalur yang sangat spesifik, yaitu emigrasi yang didasari kontrak kerja korporat yang difasilitasi oleh negara (Haggard, 1990). Sejak awal 1970-an, ketika pemerintah Orde Baru membuka lebar pintu investasi asing lewat UU PMA 1967, perusahaan-perusahaan konstruksi dan manufaktur Korea Selatan memasuki Indonesia dengan membawa serta tenaga kerja terampil mereka.¹ Jalur ini, yang dapat disebut sebagai saringan ganda korporat-negara, yakni seleksi berlapis antara kebutuhan perusahaan dan izin pemerintah kedua belah pihak², menghasilkan komunitas diaspora yang berbeda karakternya dari komunitas Korea di belahan dunia lain yang terbentuk melalui migrasi individual.

Studi-studi tentang Korea Selatan di Indonesia yang ada hingga saat ini cenderung memusatkan perhatian pada dimensi ekonomi seperti penanaman modal asing oleh Asmah (2025) yang membahas perbandingan hukum persaingan usaha (business competition law)

¹ Baca ANRI, Berkas surat B.63/Pres/4/1970 mengenai persetujuan permohonan Sam Whan Enterprise Co. Ltd., Arsip Tekstual Sekretariat Negara (ASMIN) 1967–1998, RA.89.B No. 394 (April 1970); Perjanjian Sam Hwa Enterprise, Arsip Tekstual Kementerian Tenaga Kerja (ASMIN) RA.89.B No. 431 (10 Juli 1970); Berkas surat B.80/Pres/9/1972 mengenai persetujuan permohonan Daewoo Industrial Co. Ltd., Arsip Tekstual Sekretariat Negara (ASMIN) 1967-1998, RA.89.B No. 676 (September 1972).

² Sebelum 1 Januari 1990, mobilitas warga Korea Selatan ke luar negeri dibatasi dengan pendidikan literasi serta seleksi yang diselenggarakan Anti-Communist Federation, sehingga hanya beberapa kalangan tertentu seperti pekerja perusahaan atau pebisnis yang bisa lebih leluasa berangkat. (Kim Moon-hwan, 2020:337; Choi, 2023).

antara Indonesia dan Korea Selatan dikaitkan dengan iklim investasi di kedua negara; hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Korea Selatan oleh Umam (2022), Rahman dkk. (2024) dengan Lee dan Kang (2024); relasi tenaga kerja dan perburuhan oleh Shin (2005) dan Jeon dan Yuwanto (2014) yang membahas dinamika pekerja Korea di Indonesia, serta integrasi budaya seperti mengenai pendidikan oleh Nam (2009), nasionalisme oleh Setiawati (2005), pengaruh budaya oleh Jeong dkk. (2017), Adisti (2025) dan masih banyak lagi. Tulisan yang membahas komunitas Korea di Indonesia sendiri baru ditulis dari dalam komunitas oleh Kim (2013; 2020). Sejauh mana komunitas ini mempertahankan otonomi sosial-budayanya di tengah integrasi ekonomi tersebut juga mulai mendapat perhatian. Namun, satu dimensi hampir selalu disebut tetapi belum diteliti lebih jauh adalah perempuan. Istri-istri ekspatriat yang menyertai suami mereka ke Indonesia, secara numerik merupakan bagian besar dari komunitas ini, nyaris belum pernah diposisikan sebagai subjek analisis tersendiri.

Ketidakhadiran ini mencerminkan bias yang lebih luas dalam sejarah studi migrasi. Morokvasic (1984) telah menunjukkan bahwa penelitian migrasi secara sistematis mengenyampingkan perempuan dengan asumsi bahwa migran adalah laki-laki, sementara perempuan hanyalah pelengkap tanpa agensi mandiri. Padahal dalam konteks migrasi korporat, perempuan yang menyertai suami mereka justru kerap menjadi tulang punggung pembangunan komunitas dengan menjalankan pekerjaan sosial dan kultural yang tidak terbayar, tetapi vital bagi keberlangsungan komunitas tersebut (Yeoh & Khoo, 1998). Lebih jauh, Yuval-Davis (1993) berargumen bahwa dalam komunitas diaspora dan etnik, perempuan secara khas berfungsi sebagai *reproducers of national culture* yang menjaga, mewariskan, dan mempertahankan identitas kultural komunitas kepada generasi berikutnya, tidak hanya di ranah domestik, tetapi melalui peran institusional yang terorganisir.

Dengan menggabungkan tiga kerangka teoritis tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana perempuan Korea di Indonesia membangun dan menopang infrastruktur sosial-budaya komunitas diaspora Korea melalui organisasi dan aktivitas kolektif dalam periode 1973-1998? Argumen utama artikel ini adalah bahwa jalur emigrasi korporat-negara yang dilalui ekspatriat Korea Selatan memang sejak awal tidak dirancang untuk berfokus pada Perempuan, tetapi justru dari posisi subordinat itu, perempuan Korea membangun jaringan dan struktur sosial yang menjadi tulang punggung kehidupan komunitas mereka. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana sebuah diaspora terbentuk: tidak hanya melalui kerja ekonomi para ekspatriat laki-laki, tetapi melalui kerja sosial-budaya perempuan yang secara historis kurang terdokumentasi.

Pola ini bukan anomali dalam studi migrasi gender kontemporer. Dalam kajian yang lebih luas tentang diaspora dan migrasi berbasis gender, telah terdokumentasi secara konsisten bahwa pengalaman diaspora selalu bias terhadap gender, tetapi kecenderungan teoritis dalam studi diaspora adalah membahas perpindahan dan pembentukan komunitas dalam cara yang tidak bermarkah gender, sehingga pengalaman laki-laki menjadi norma implisit sementara pengalaman perempuan tersisihkan dari kerangka analitis utama (Féron, 2021:2). Perkembangan terkini dalam kajian gender dan migrasi merespons gap ini secara lebih sistematis, tidak hanya dengan menempatkan perempuan sebagai subjek analisis, tetapi dengan menganalisis bagaimana kategori-kategori migrasi itu sendiri, termasuk kategori *accompanying spouse*, merupakan konstruksi yang bias gender secara struktural (Christou & Kofman, 2022).

Artikel ini berpijak pada perkembangan tersebut, memposisikan perempuan Korea di Indonesia bukan sekadar penyandang kategori *accompanying spouse* yang pasif, melainkan subjek yang aktif menavigasi dan menegosiasikan batas-batas kategori itu sendiri.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah kualitatif dengan analisis dua jenis sumber yang saling melengkapi. Sumber pertama adalah rekaman institusional mengenai Asosiasi Perempuan Korea (제인도네시아한국부인회) dalam buku Indonesia Han-in 100-nyeon-sa (인도네시아한인 100 년사/100-Year History of Indonesian Koreans) yang menyediakan kronologi aktivitas organisasi dari 1973 hingga awal 2000-an, mencakup nama-nama ketua asosiasi, kegiatan konkret, jumlah donasi, dan konteks politik-komunitas di setiap periode kepemimpinan. Sumber ini diperlakukan sebagai dokumen sejarah komunitas yang merekam perspektif institusional resmi. Sumber kedua adalah rekaman audiovisual personal (video blog) dari kanal YouTube Priscilla Lee yang diunggah antara 2021 hingga 2026 memuat narasi ibunya, seorang perempuan Korea generasi pertama yang datang ke Indonesia pada November 1992, tentang pengalaman kedatangan, adaptasi, kehidupan komunitas, dan perannya sebagai guru di JIKS (Jakarta Indonesian Korean School). Sumber-sumber ini diperlakukan sebagai sumber rekaman audiovisual yang dapat dikutip berdasarkan timestamp, dan bukan sebagai oral history dalam pengertian konvensional, mengingat narasi ini disampaikan secara publik oleh subjeknya sendiri dalam format media digital tanpa mediasi peneliti.

Pengolahan kedua jenis sumber tersebut mengikuti empat tahapan metode sejarah. Pertama, heuristik, yakni pengumpulan data dari sumber tertulis (buku institusional) dan sumber audiovisual (rekaman video), yang ditelusuri secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, perempuan Korea sebagai arsitek infrastruktur sosial-budaya diaspora. Kedua, kritik, mencakup verifikasi data secara internal maupun eksternal: kritik internal dilakukan dengan membandingkan konsistensi informasi antar kedua jenis sumber sejauh keduanya bersinggungan, sementara kritik eksternal mempertimbangkan konteks produksi masing-masing sumber, buku institusional sebagai dokumen resmi organisasi dan video sebagai narasi personal yang diunggah puluhan tahun setelah peristiwa berlangsung, sehingga rentan terhadap bias ingatan (*memory bias*). Ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran kesesuaian data yang diperoleh dengan fokus penelitian, di mana narasi institusional dibaca sebagai catatan resmi kegiatan komunitas, sedangkan narasi personal dibaca sebagai pengalaman hidup yang mengisi celah-celah yang tidak tertangkap oleh catatan resmi tersebut. Keempat, historiografi, yaitu penulisan hasil analisis ke dalam narasi tematik-kronologis yang memadukan kedua sumber tersebut ke dalam alur argumentasi mengenai peran perempuan dalam pembentukan diaspora.

Periode kajian ditetapkan dari 1973, tahun berdirinya Asosiasi Perempuan Korea, hingga 1998, ketika krisis moneter menjadi titik transformasi komunitas Korea di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik: membangun narasi kronologis dari sumber institusional, kemudian membaca narasi personal sebagai jendela pengalaman yang tidak tertangkap oleh catatan resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

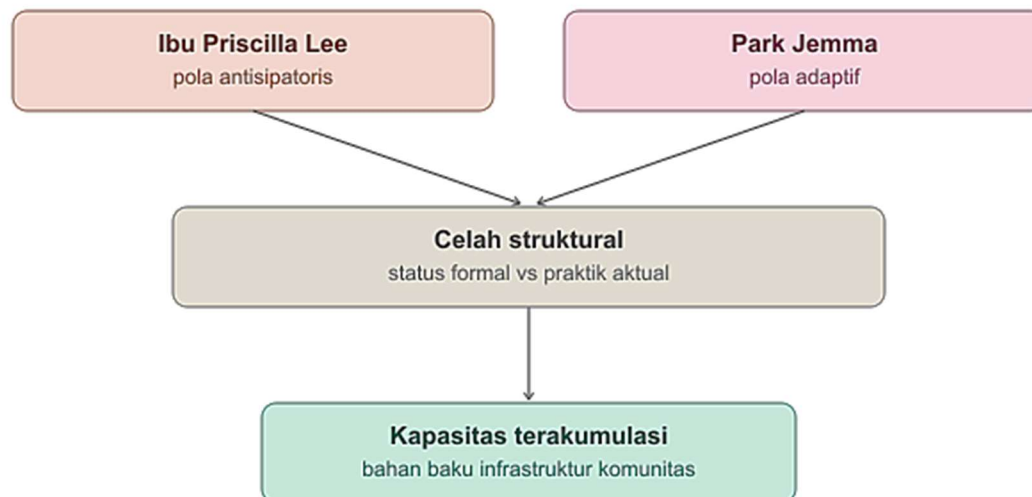
Struktur Gender dalam Jalur Korporat-Negara

Komunitas Korea Selatan di Indonesia tidak hanya muncul dari keputusan migran individual yang mencari peluang ekonomi, melainkan dari keputusan institusional yang melibatkan perusahaan dan negara secara bersamaan. Sebagian pekerja Korea Selatan datang lewat kapal muatan karena transportasi udara tidak mudah dan memerlukan biaya terlalu besar (tvOne, 2023), sementara yang lain menggunakan jalur udara transit dari Hong Kong menuju Jakarta (Rosakis, 2022; The Jakarta Post, 1995 dan Kim, 2020). Dalam skenario awal seperti ini, tentu perempuan tidak tergambar jelas sebagai peran yang menonjol. Jalur korporat-negara secara struktural menetapkan laki-laki sebagai subjek migrasi, pemegang kontrak, penerima visa kerja, unit yang dikirim oleh perusahaan. Pembagian gender ini memiliki akar ideologis yang perlu dikenali. Korea Selatan membangun tata kelola negara dan struktur korporasinya di atas prinsip-prinsip Konfusian yang secara normatif memisahkan ruang publik sebagai domain laki-laki dan ruang domestik sebagai domain perempuan, sebuah hierarki yang bahkan terkodifikasi dalam hukum keluarga Korea hingga reformasi besar 2005 (Moon & Choe, 2020; Lowe-Lee, 2011). Dalam konteks ekspansi korporat internasional, asumsi ini terbawa: perusahaan mengirim laki-laki sebagai tenaga kerja dan mengasumsikan perempuan sebagai pendamping yang akan mengurus ranah domestik di negara tujuan.

Sementara itu, perempuan hadir dalam kategori yang berbeda: istri yang mengikuti suami. Dalam kajian tentang perempuan ekspatriat korporat, posisi ini kerap dijelaskan melalui kerja emosional dan ideologis yang mereka lakukan, kerja yang vital bagi keberhasilan penugasan korporat suami mereka, tetapi secara sistematis tidak diakui dan bahkan sering direndahkan melalui stereotip perempuan ekspatriat yang pasif dan tidak produktif (Fechter, 2010). Pola ini bukan kekhususan diaspora Korea: dalam kajian migrasi gender, telah terdokumentasi secara luas bahwa migrasi tenaga kerja terampil bersifat maskulin secara struktural, di mana laki-laki masuk melalui jalur kerja sementara perempuan masuk sebagai pendamping dalam kategori migrasi keluarga (Christou & Kofman, 2022).

Namun, kategori “ikut suami” ini menyembunyikan kompleksitas yang lebih dalam. Ibu dari Priscilla Lee mengikuti suaminya ke Indonesia pada November 1992 setelah menikah empat bulan, dan telah mengambil les privat Bahasa Indonesia selama sebulan sebelum berangkat, tindakan seseorang yang tidak pasif menyerahkan nasib pada jalur yang telah ditetapkan orang lain. Park Jemma, istri Kim Woo-Jae, pendiri supermarket makanan dari Korea, Mu Gung Hwa, menunjukkan pola yang berbeda tetapi sejajar: sesampainya di Jakarta pada 1980, ia tidak berhenti di peran “istri yang ikut”, ia membantu suaminya menyiapkan makanan Korea untuk dijual ke komunitas dan belajar kosakata barang-barang di sekitarnya sampai 100 kata dalam sehari. Dua pola ini mencerminkan dua ekspresi agensi yang berbeda: satu antisipatoris (mempersiapkan kapasitas sebelum tiba), satu adaptif (mengembangkan kapasitas segera setelah tiba). Keduanya beroperasi di celah yang sama, antara status formal accompanying spouse dan praktik aktual yang tidak diatur oleh status itu (lihat Gambar 1). Morokvasic (1984) berargumen bahwa agensi perempuan migran selama ini tidak terlihat bukan karena tidak ada, melainkan karena kerangka analitis yang digunakan tidak menyediakan ruang untuk melihatnya. Kajian terkini tentang trailing spouses memperkuat temuan ini: perempuan yang datang sebagai pendamping tidak hanya beradaptasi secara pasif, tetapi secara

aktif menegosiasikan posisi dan membangun kapasitas baru dalam kondisi yang membatasi (Mehta & Sharma, 2025). Kasus ibu Priscilla dan Park Jemma menunjukkan lebih jauh: agensi itu tidak hanya ada dalam berbagai bentuk, tetapi konsisten mengarah ke satu tujuan yang sama, membangun kapasitas yang kelak menjadi bahan baku infrastruktur sosial komunitas yang lebih besar.



Gambar 1. Dua Pola Agensi Perempuan Korea di Indonesia: Antisipatoris dan Adaptif
Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Asosiasi Perempuan Korea di Indonesia

Pada tahun 1973, setelah Kedutaan Besar Korea Selatan baru saja dibuka di Jakarta dan populasi orang Korea di Indonesia baru berjumlah sekitar 700 orang, Duta Besar pertama Kim Jwa-gyeom mendorong pembentukan sebuah organisasi Perempuan (Kim, 2020), setelah Asosiasi Korea didirikan oleh kumpulan petinggi perusahaan Korea di Indonesia pada 1972. Asosiasi Perempuan Korea pun berdiri pada 1973, dua tahun sebelum Jakarta International Korean School pada 1975. Urutan kronologis ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jaringan sosial terorganisir bagi perempuan dirasakan hampir seketika setelah komunitas mulai terbentuk, mendahului bahkan institusi pendidikan. Urutan ini memiliki implikasi analitis yang lebih dalam: infrastruktur sosial yang dibangun perempuan bukan sekadar pelengkap institusi komunitas yang lebih besar, tetapi prasyaratnya. Komunitas yang sudah memiliki jaringan sosial terorganisir pada 1973 adalah komunitas yang sudah memiliki kapasitas untuk membayangkan, mendanai, dan mengisi institusi pendidikan dua tahun kemudian. Tanpa Asosiasi, JIKS mungkin akan tetap terbentuk, tetapi proses formasinya, pendanaannya, dan keberlanjutannya akan sangat berbeda.

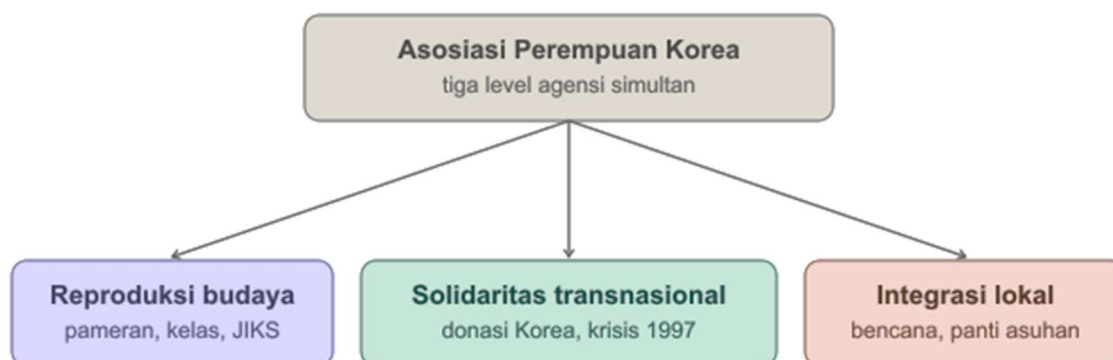
Selama delapan tahun pertama, Asosiasi dipimpin oleh istri-istri diplomat. Pertemuan diadakan satu hingga dua kali setahun di kediaman resmi duta besar, satu-satunya ruang yang memiliki kapasitas cukup saat itu. Ini adalah fase organisasi yang bergantung pada negara secara logistik sekaligus simbolik sampai tahun 1981, ketika istri Duta Besar ke-4 Han Woo-seok, yaitu Lee Young-ja, menyatakan bahwa sudah saatnya asosiasi ini dijalankan oleh

masyarakat sipil, bukan pemerintah (Kim, 2020). Segera tahun depannya, pada tahun 1982, ketua asosiasi pertama, Kim Jeong-sun, dilantik.

Transisi dari kepemimpinan diplomatik ke kepemimpinan sipil ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi juga mencerminkan trajektori yang lebih besar yaitu komunitas yang dimulai oleh fasilitas negara, sekarang secara bertahap diambil alih dan dikelola oleh komunitas korporat-sipil itu sendiri. Yang perlu dicatat adalah posisi paradoksal di balik transisi ini adalah Lee Young-ja sebagai istri Duta Besar, sosok yang posisinya paling melekat pada negara di antara seluruh perempuan dalam komunitas, justru yang mendorong Asosiasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan institusional pada negara. Paradoks ini mengungkap sesuatu yang penting tentang cara agensi beroperasi dalam komunitas diaspora korporat: perempuan yang paling terikat pada jalur korporat-negara justru yang pertama melihat bahwa komunitas membutuhkan ruang yang tidak dikuasai jalur tersebut. Dalam hal ini, Asosiasi Perempuan Korea bergerak sejajar dengan dinamika yang sama di institusi komunitas Korea yang lebih besar.

Tiga Level Agensi: Reproduksi Budaya, Solidaritas Transnasional, dan Integrasi Lokal

Hal yang paling signifikan dalam analisis sejarah Asosiasi Perempuan Korea bukan semata dilihat dari daftar kegiatannya, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi pada tiga level berbeda secara bersamaan dan mencerminkan posisi unik perempuan dalam komunitas diaspora sebagai penghubung antara tanah asal, komunitas mereka di negara tujuan, dan masyarakat lokal (lihat Gambar 2). Ketiga level ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang dan membentuk satu pola agensi kolektif yang koheren.



Gambar 2. Tiga Level Agensi Asosiasi Perempuan Korea

Sumber: Diolah Penulis (2026) dari Yuval-Davis (1993), Mehta dan Sharma (2025)

Dalam level pertama yaitu reproduksi budaya, Asosiasi Perempuan Korea menyelenggarakan pameran lukisan perempuan Korea pertama di Indonesia pada April 1981, serta kelas melukis dan golf untuk anggota komunitas, serta pertunjukan hanbok klasik pada 1988 yang dihadiri oleh ibu negara Kim Ok-Sun dalam kunjungan kenegaraan Presiden Roh Tae-woo. Pada 1994, pameran lukisan kembali digelar (Kim, 2020, pp. 315–316). Yuval-Davis (1993) mengidentifikasi reproduksi budaya sebagai salah satu fungsi khas perempuan dalam komunitas diaspora dan etnik. Dalam kasus ini, fungsi tersebut terwujud secara konkret dan terukur.

Yang paling strategis dari semua ini adalah kontribusi Asosiasi kepada JIKS. Ketua Asosiasi Perempuan Korea (1989-1994), Han Jeong-ja dan ketua Asosiasi Perempuan Korea (1997-1998), Kim Young-ja, menyerahkan dana pendirian kepada JIKS sebanyak US\$7,300 untuk pembangunan gedung sekolah ketiga (Kim, 2020, pp. 316–317). Dengan kata lain: perempuan tidak hanya hadir di JIKS sebagai orang tua dari murid, mereka juga yang membiayai pengelolaan dan pembaruan fasilitasnya.

Ibu Priscilla Lee memperkuat narasi ini dari sudut yang berbeda: ia menjadi guru di JIKS (Lee, 2021c, 06:21). Perempuan Korea seperti dirinya tidak hanya mendanai institusi reproduksi kultural tersebut, mereka menjalankannya dari dalam. Namun posisi ini melahirkan paradoks yang menarik. Karena Priscilla lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk mengajar, anak-anaknya justru lebih banyak berinteraksi dengan pengasuh berbahasa Indonesia, sehingga ia dan saudara-saudaranya lebih fasih berbahasa Indonesia daripada Korea di usia dini (Lee, 2021c, 06:08–07:14). Jeon & Yuwanto (2014) mencatat pola serupa: status sosial-ekonomi yang relatif tinggi membuat sebagian besar perempuan Korea di Indonesia mempekerjakan pembantu dan pengasuh, yang pada gilirannya menjadi figur bahasa utama bagi anak-anak mereka.

Paradoks ini mengungkap tegangan struktural yang lebih dalam: institusi yang dibangun untuk mempertahankan identitas Korea di ruang publik justru secara tidak langsung mengikis identitas itu di ruang privat. Bukan karena proyeknya gagal, melainkan karena perempuan yang menopangnya menanggung beban ganda, sebagai penjaga budaya komunitas sekaligus ibu yang absen dari rumah. Tegangan ini bukan anomali, melainkan kondisi yang inheren dalam pengalaman diaspora, dan justru karena itu layak mendapat perhatian analitis yang lebih serius.

Tegangan ini tidak perlu diselesaikan untuk dianalisis. Kajian tentang perempuan dalam konteks migrasi korporat menunjukkan bahwa proses semacam ini, di mana perempuan membangun bentuk-bentuk baru kapasitas dan keterlibatan di luar struktur yang secara formal membatasi mereka, merupakan respons adaptif yang konsisten, bukan anomali (Mehta & Sharma, 2025). Bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh perempuan paling aktif menjaga identitas Korea di ruang publik justru tumbuh lebih fasih berbahasa Indonesia adalah cerminan dari kompleksitas pengalaman diaspora yang sesungguhnya: komunitas terbentuk melalui tegangan antara mempertahankan dan beradaptasi, bukan melalui salah satunya saja.

Pada level kedua, perempuan berperan sebagai penjaga ekspresi solidaritas transnasional dengan tetap menjaga kepedulian terhadap masyarakat di negara asal. Melalui Asosiasi Perempuan Korea, ketua asosiasi ke-3 Kang Jeong-ja (1984–1985) mengirimkan US\$600 untuk pasien operasi katarak di Korea, lalu ketua asosiasi ke-4 Baek Bang-ja (1986–1987) menyumbang untuk korban banjir di Korea; dan ketua asosiasi ke-5 Park Eun-ju mengadakan konser amal pada tahun 1996 untuk mengumpulkan donasi dari 50 perusahaan Korea dan komunitas (Kim, 2020:316). Puncak solidaritas transnasional ini terjadi pada 1997, ketika Korea Selatan menghadapi krisis moneter dan kampanye "Send Dollars Home" diluncurkan, anggota komunitas turut aktif menyumbang dari sisa dana rumah tangga untuk kampanye ini (Kim, 2020, p. 317). Framing "sisa dana rumah tangga" ini mengungkapkan sesuatu yang penting, tetapi bukan hanya tentang 1997. Seluruh pola donasi Asosiasi sepanjang periode kajian, untuk pasien katarak di Korea, korban banjir, korban bencana di Bandung, panti asuhan di Pluit, semuanya mengalir dari kapasitas yang sama: kemampuan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya dari ruang domestik ke tujuan kolektif. Karena perempuan adalah pengelola keuangan domestik sehari-hari, mereka adalah yang paling langsung dan paling konsisten dapat merespons ketika komunitas, baik di tanah asal maupun di

masyarakat tuan rumah, membutuhkan dukungan material. Agensi finansial ini tidak terlihat sebagai “produktivitas ekonomi” justru karena ia beroperasi di dalam dan melalui kategorisasi yang merendahnya.

Level ketiga, Asosiasi Perempuan Korea juga menunjukkan keterlibatan yang konsisten dan beragam untuk mengelola relasi dengan masyarakat lokal. Ketua asosiasi ke-5 mendonasikan seluruh hasil fashion show sebanyak 20 juta rupiah untuk korban bencana gunung berapi di Bandung pada tahun 1988; ketua asosiasi ke-6 hingga ke-8 secara rutin mendukung panti asuhan di komunitas rumah panggung Pluit, dan ketua asosiasi ke-11, Park Eun-gyeong (1999–2000) mengumpulkan bantuan untuk pengungsi Timor Timur dan mendukung panti jompo perempuan Tresna Werdha Bhakti Mulia (Kim, 2020:317). Kemudian, yang paling berdampak jangka panjang adalah kontribusi Asosiasi Perempuan Korea dalam menggalang US\$10,000 untuk Pusat Studi Korea di Universitas Nasional (UNAS) pada 1987, yang kelak berkontribusi pada pendirian Jurusan Bahasa Korea pertama di universitas yang sama pada tahun 1994 (Kim, 2020: 315). Dengan kata lain, perempuan Korea secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan minat akademik terhadap Korea di Indonesia, membuka jalur bagi generasi peneliti dan pemerhati Korea-Indonesia di masa mendatang.

Kombinasi ketiga level ini mencerminkan apa yang oleh Yeoh & Khoo (1998) diidentifikasi sebagai strategi multidimensi perempuan dalam migrasi korporat: mereka tidak hanya mengelola ranah domestik, tetapi secara aktif menegosiasikan posisi komunitas mereka dalam lanskap sosial yang lebih luas, sekaligus ke arah tanah asal dan ke arah masyarakat tuan rumah.

Tabel 1. Kronologi Kepemimpinan Asosiasi Perempuan Korea 1973-1998

Nama	Periode Kepemimpinan	Latar Belakang	Kegiatan/Kontribusi Kunci
(Istri-istri diplomat yang tidak disebutkan)	1973-1981	Istri Duta Besar	Pertemuan 1-2 kali setahun di kediaman resmi Dubes
Lee Young-ja	1981	Istri Duta Besar ke-4, Han Woo-seok	Mendorong transisi Asosiasi ke kepemimpinan sipil
Kim Jeong-sun	1982	Sipil	Ketua sipil pertama pasca-transisi
Kang Jeong-ja	1984-1985	Sipil	Mengisi \$600 untuk pasien operasi katarak di Korea
Baek Bang-ja	1986-1987	Sipil	Sumbangan untuk korban banjir di Korea
Park Eun-ju	1988 & 1996	Sipil	Donasi hasil <i>fashion show</i> Rp. 20 juta untuk korban bencana gunung berapi Bandung; konser amal 1996 kumpulkan dana dari 50 perusahaan Korea
Han Jeong-ja	1989-1994	Sipil	Menyerahkan \$7.300 untuk gedung sekolah baru JIKS
Kim Young-ja	1997-1998	Sipil	Bersama
Park Eun-gyeong	1999-2000	Sipil	Bantuan pengungsi Timor Timur; dukungan panti jompo Tresna Werdha Bhakti Mulia

Sumber: Diolah dari Kim, (2020).

Perempuan sebagai Faktor Kausalitas Kumulatif

Massey dkk. (1993) berargumen bahwa setiap tindakan migrasi mengubah konteks sosial sehingga migrasi berikutnya menjadi lebih mudah dan lebih mungkin terjadi, sebuah proses yang ia sebut kausalitas kumulatif. Jaringan sosial, institusi komunitas, dan infrastruktur kultural yang terbentuk dari gelombang migrasi terdahulu berfungsi sebagai sumber daya bagi pendatang berikutnya. Dalam konteks ini, Asosiasi Perempuan Korea dapat dibaca sebagai salah satu mekanisme kausalitas kumulatif yang secara khusus bekerja bagi perempuan. Keberadaan jaringan sosial terorganisir sejak 1973 dan semakin menguat di dekade-dekade berikutnya membuat keputusan “ikut suami ke Indonesia” menjadi lebih terbayangkan bagi perempuan Korea yang datang belakangan. Ada komunitas yang akan menyambut, ada orang-orang yang memahami pengalaman yang sama, ada institusi yang menyediakan keterlibatan bermakna.

Ketika ibu Priscilla Lee melahirkan sementara suaminya sedang bertugas di Amerika Serikat, yang menemaninya adalah “teman papi, orang Korea juga” (Lee, 2021c, 01:41). Jaringan komunitas ini, yang sebagian besarnya dibangun dan dirawat oleh perempuan generasi sebelumnya, berfungsi sebagai keluarga pengganti di negeri asing. Tanpa jaringan itu, kerentanan yang dialami seorang perempuan yang jauh dari keluarga biologis dan menghadapi momen kritis tanpa suami akan jauh lebih besar. Dengan keberadaan jaringan itu, momen tersebut bisa ditanggung.

Koneksi antara kerja perempuan di Asosiasi dan fungsi “keluarga pengganti” ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi hasil dari dekade-dekade kerja terorganisir yang membangun dan merawat jaringan: pertemuan rutin, kegiatan bersama, solidaritas dalam krisis. Ketika ibu Priscilla menghadapi persalinan tanpa suami dan dibantu oleh jaringan komunitas Korea, ia sedang merasakan buah dari kerja kolektif perempuan generasi sebelumnya, jaringan yang berfungsi sebagai sumber daya komunitas yang menentukan apakah kerentanan individual bisa ditanggung atau tidak (Mehta & Sharma, 2025). Inilah yang dimaksud Massey dkk. (1993) dengan kausalitas kumulatif: dalam kasus ini, mekanisme kumulatif itu secara spesifik adalah kerja sosial perempuan yang terakumulasi menjadi kapasitas komunitas untuk menanggung kerentanan individual.

SIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa jalur korporat-negara yang membawa komunitas Korea ke Indonesia bukan sekadar struktur ekonomi, ia adalah struktur yang bias gender secara sistemik. Laki-laki Korea memasuki Indonesia sebagai aktor ekonomi; perempuan Korea memasuki Indonesia sebagai accompanying spouse. Namun, dari posisi struktural yang subordinat itu, perempuan Korea mengembangkan agensi kolektif yang menjadi fondasi dari infrastruktur sosial-budaya komunitas.

Asosiasi Perempuan Korea, berdiri sejak 1973 dan beralih ke kepemimpinan sipil pada 1982, beroperasi di tiga level sekaligus: mempertahankan identitas budaya Korea melalui institusi dan kegiatan kultural, menjaga solidaritas transnasional dengan tanah asal, dan membangun keterlibatan dengan masyarakat Indonesia. Ketiganya bukan aktivitas terpisah, melainkan ekspresi dari satu peran yang diidentifikasi sebagai fungsi khas perempuan dalam komunitas diaspora: reproduksi identitas nasional dalam kondisi perpindahan. Bahwa Asosiasi

mendanai JIKS, mengisi posisi guru di sekolah yang sama, dan sekaligus menyumbang untuk bencana lokal dan krisis nasional, semua ini menggambarkan agensi yang bekerja di banyak arah sekaligus.

Paradoks yang muncul dari posisi ini, bahwa perempuan yang paling aktif menjaga identitas Korea di ruang publik kadang justru membesarkan anak-anak yang lebih fasih berbahasa Indonesia, bukan sebuah kontradiksi yang perlu diselesaikan, melainkan cerminan dari kompleksitas pengalaman diaspora yang sesungguhnya. Beban ganda yang ditanggung perempuan dalam komunitas ini tidak menghapus agensi mereka; justru sebaliknya, ia memperlihatkan seberapa besar kontribusi yang mereka berikan dalam kondisi yang tidak selalu dirancang untuk mendukung mereka. Temuan ini memiliki implikasi yang lebih luas bagi studi diaspora: cara sebuah komunitas tiba di negara tujuan tidak hanya menentukan karakter ekonominya, tetapi juga struktur gender yang membentuk keberlanjutannya. Dalam kasus diaspora Korea di Indonesia, komunitas tidak hanya bertahan karena kesuksesan bisnis para ekspatriat, melainkan karena kerja kolektif perempuan yang membangun dan merawatnya dari dalam.

SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Sumber tentang pengalaman perempuan individu masih bertumpu pada sedikit kasus naratif, sehingga belum dapat merepresentasikan keragaman pengalaman di antara perempuan Korea di Indonesia secara menyeluruh. Penelitian lanjutan yang mengintegrasikan lebih banyak narasi personal, terutama dari anggota biasa Asosiasi, bukan hanya pemimpinnya, akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana agensi perempuan dalam komunitas diaspora korporat bekerja di berbagai strata sosial.

REFERENSI

- Adisti, R., & Konety, N. (2025). Diplomasi budaya Korea Selatan terhadap Indonesia melalui drama Korea bertema keluarga tahun 2021-2023. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(1), 52–79. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.658>
- Asmah, & Pasanda, D. (2025). Indonesia and South Korea business competition laws in the investment sector. *Unes Law Review*, 7(4), 1413–1419. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i4.2442>
- Choi Gye Wol's Kodeco opens up S. Kalimantan. (1995, 12 Agustus). *The Jakarta Post*. <https://jawawa.id/newsitem/choi-gye-wols-kodeco-opens-up-s-kalimantan-1447893297>
- Choi, I. (2003). Korean diaspora in the making: Its current status and impact on the Korean economy. Peterson Institute for International Economics.
- Christou, A., & Kofman, E. (2022). *Gender and migration: IMISCOE short reader*. Springer.
- Fechter, A. M. (2010). Gender, empire, global capitalism: Colonial and corporate expatriate wives. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(8), 1279–1297.
- Féron, É. (2021). Gender and diaspora. Dalam T. Väyrynen, S. Parashar, É. Féron, & C. C. Confortini (Eds.), *Routledge handbook of feminist peace research* (hlm. 428–435). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429024160-46>
- Haggard, S. (1990). *Pathways from the periphery: The politics of growth in the newly industrializing countries*. Cornell University Press.
- Jeon, H., & Yuwanto. (2014). *Era emas hubungan Indonesia-Korea*. Penerbit Buku Kompas.

- Jeong, J.-S., Lee, S.-H., & Lee, S.-G. (2017). When Indonesians routinely consume Korean pop culture: Revisiting Jakartan fans of the Korean drama *Dae Jang Geum*. *International Journal of Communication*, 11, 2288–2307.
- Kim, M., et al. (2020). Indonesia Han-in 100-nyeon-sa: Han-in-gwa Han-in-gieob-eui seonggong jincul-sa [100-Year history of Indonesian Koreans: A history of Korean and Korean enterprises' successful advancement]. Korean Association.
- Korean Embassy Indonesia & tvOne. (2023, 29 Desember). Koreans on the equator [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=a8-g3XBwvCk>
- Lee, H.-K. (2005). The Korean diaspora and its impact on Korea's development. *Asian and Pacific Migration Journal*, 14(1–2), 149–168.
- Lee, J.-M., & Kang, J. H. (2024). Building a sustainable economic partnership: Challenges and opportunities for Korea and Indonesia (Research Paper No. 24/IER/29/02/02). Korea Institute for Industrial Economics and Trade.
- Lee, P. (2021a, Oktober 16). Koreans are overstaying in Indonesia [Video]. YouTube. <https://youtu.be/sCFoEyPbwvU>
- Lee, P. (2021b, September 3). Pengalaman susah di Indonesia [Video]. YouTube. <https://youtu.be/aINZaA4ivWY>
- Lee, P. (2021c, Agustus 27). Pernah nyesel ikut papi ke Indonesia ga? [Video]. YouTube. https://youtu.be/a-mt0_SCpiI
- Lee, P. (2026, April 4). Kenapa lebih nyaman hidup sebagai WNI? [Video]. YouTube. <https://youtu.be/bcMV7jQz0SU>
- Lowe-Lee, F. (2011). Korean women: You have come a long way. Korea Economic Institute of America.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431–466.
- Mehta, S., & Sharma, N. (2025). Belonging, loss, and reinvention among Indian trailing spouses in Thailand: A mixed-methods study. *Social Science Research Network (SSRN)*.
- Moon, H., & Choe, M. K. (2020). Parent-child relationship in Korea: Legal status and social implications seen through family law changes 1958–2005. Seoul National University & East-West Center.
- Morokvasic, M. (1984). Birds of passage are also women. *International Migration Review*, 18(4), 886–907.
- Nam, J.-H. (2009). Sejarah kerja sama Indonesia–Korea Selatan di bidang pendidikan dan kebudayaan: 1960-an–sekarang [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].
- Rahman, F. F., Timur, F. G. C., & Midhio, I. W. (2024). The impact of Indonesia-South Korea cooperation as evidence of effective bilateral cooperation in the Asia Pacific region. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 48(1), 623–631.
- Rosakis. (2022, 13 April). Alasan & cerita papa Korea ke Indonesia th1981 [Video]. YouTube. <https://youtu.be/KRk9lr0mGUM>
- Setiawati, N. A. (2005). A comparison on Indonesian and South Korean nationalism: A historical perspective. *Humaniora*, 17(3), 225–235.
- Shin, Y. H. (2005). Aspek hubungan perburuhan perusahaan Korea di Indonesia pada awal 1990-an: Manajemen ala Korea dan wacana buruh. *Kyoto Review of Southeast Asia*, 11.
- Umam, A. K. (2022). Revisiting Indonesia-South Korea economic partnership in the 50th anniversary of diplomatic ties. Korea Institute for Industrial Economics & Trade (KIET), GTIPA Seoul.
- Yeoh, B. S. A., & Khoo, L.-M. (1998). Home, work and community: Skilled international migration and expatriate women in Singapore. *International Migration*, 36(2), 159–186.

Yuval-Davis, N. (1993). Women, ethnicity and empowerment (Working Paper No. 151).
Institute of Social Studies.